

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tenaga Kerja

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Purnamawati & Khoirudin, 2019). Pengertian tenaga kerja menurut Sumitro Djojohadikusumo adalah semua orang yang bersedia dan sanggup, dan golongan ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri, anggota keluarga yang tidak menerima bayaran serta mereka yang bekerja untuk menerima bayaran/upah/gaji.

Simanjuntak (1985) menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lain seperti bersekolah atau mengurus rumah tangga dengan batasan umur 15 tahun. Teori permintaan menurut Simanjuntak (1985) menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Sehubungan dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dengan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan. Permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Masyarakat membeli barang dan jasa karena barang dan jasa tersebut memberikan kepuasan kepadanya. Sementara pengusaha mempekerjakan seseorang karena orang tersebut membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada

masyarakat. Dengan kata lain, pertambahan permintaan terhadap tenaga kerja bergantung pertambahan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang diproduksi. Permintaan tenaga kerja yang seperti itu dinamakan *derived demand* (Anggriawan, 2007).

Sitanggang dan Nachrowi (2004) memberikan ciri-ciri kepada tenaga kerja yang diantara lain:

1. Tenaga kerja umumnya tersedia di pasar tenaga kerja dan biasanya siap untuk digunakan dalam suatu proses produksi barang dan jasa. Kemudian perusahaan atau penerima tenaga kerja meminta tenaga kerja dari pasar tenaga kerja. Apabila tenaga kerja tersebut telah bekerja maka mereka akan menerima imbalan berupa upah atau gaji.
2. Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang sangat dibutuhkan pada setiap perusahaan untuk mencapai tujuan.

Ciri-ciri tenaga kerja yang dibutuhkan di era globalisasi adalah tenaga kerja yang memiliki daya saing tinggi, berinisiatif, kreatif, percaya diri, bertanggung jawab, mampu bekerjasama, berani mengambil keputusan, memiliki kemampuan solusi masalah berdasarkan konsep ilmiah, berorientasi pada peningkatan terus-menerus, memiliki pengetahuan yang terintegrasi antar disiplin ilmu untuk solusi masalah industri dan memahami penggunaan teknologi sebagai bagian integral dari proses belajar.

BPS (Badan Pusat Statistik) membagi tenaga kerja (*employed*) atas 3 macam, yaitu :

1. Tenaga kerja penuh (*full employed*), adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja > 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas.
2. Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (*under employed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam seminggu.
3. Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (*unemployed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja $0 > 1$ jam per minggu.

2.1.2 Teori Tenaga Kerja

Adam Smith (1729-1790) merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang dikenal sebagai aliran klasik. Dalam konteks ini, teori klasik Adam Smith menyatakan bahwa kekayaan suatu negara akan meningkat sejalan dengan tingkat ketrampilan tenaga kerja yang diterapkan. Sumber pendapatan utama berasal dari produksi hasil kerja dan sumber daya ekonomi. Menurut pandangan Adam Smith, nilai suatu barang ditentukan oleh keunggulan mutlak. Keunggulan mutlak, dalam perspektif Smith, merujuk pada kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dengan memanfaatkan teknologi dan efisiensi tenaga kerja. Dalam teorinya yang dikenal sebagai "*Labor Theory of Value*" Smith berpendapat bahwa semakin banyak tenaga kerja yang digunakan dalam produksi, maka nilai barang yang dihasilkan akan semakin tinggi. Tingkat kemakmuran suatu negara diukur berdasarkan jumlah barang yang diproduksi, yang pada proses produksinya membutuhkan penyerapan tenaga kerja yang besar.

Teori tenaga kerja industri padat karya yang dikemukakan oleh Michael P. Todaro, teori ini dijelaskan secara mendalam dalam bukunya yang berjudul "Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga", yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1995 oleh penerbit Erlangga (Todaro, 1995). Teori itu menyoroti peran penting sektor industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja dalam perekonomian, terutama di negara-negara berkembang. Industri padat karya, seperti tekstil, pakaian, dan alas kaki, dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, termasuk pekerja tidak terampil atau setengah terampil. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan menyediakan banyak lapangan kerja. Todaro juga menekankan bahwa pertumbuhan industri padat karya seringkali mendorong migrasi dari pedesaan ke perkotaan karena orang mencari peluang kerja yang lebih baik, sejalan dengan model migrasi yang ia kembangkan. Meskipun industri ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat, ada tantangan yang perlu diatasi, seperti kondisi kerja yang buruk dan upah rendah. Oleh karena itu, Todaro mengusulkan bahwa kebijakan pemerintah harus fokus pada peningkatan kondisi kerja, pelatihan keterampilan, dan diversifikasi ekonomi untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, teori ini menekankan pentingnya pengembangan sektor industri padat karya sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang lebih luas dan berimbang.

2.1.3 Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja

terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja. Menurut Handoko dalam buku Simanjutak bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha (Tulumang et al., 2019).

Penyerapan tenaga kerja pada dasarnya tergantung dari besar kecilnya permintaan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja secara umum menunjukkan besarnya kemampuan suatu perusahaan menyerap sejumlah tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk. Kemampuan untuk menyerap tenaga kerja besarnya tidak sama antara sektor satu dengan sektor yang lain (Purnamawati & Khoirudin, 2019). Penyerapan tenaga kerja ialah banyaknya lapangan pekerjaan yang telah terisi yang tercermin dari banyaknya pertumbuhan penduduk bekerja. Terserapnya penduduk bekerja dan ditempatkan di berbagai sektor perekonomian disebabkan oleh adanya permintaan tenaga kerja, dengan kata lain penyerapan tenaga kerja disebut juga sebagai permintaan tenaga kerja (Widyaningrum & Bintariningtyas, 2021).

Kesempatan masyarakat bekerja dalam penyerapan tenaga kerja industri tersebar di berbagai sektor. Sektor yang mempekerjakan banyak orang umumnya menghasilkan barang dan jasa yang relatif besar. Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda. Demikian pula dengan kemampuan setiap sektor dalam

menyerap tenaga kerja. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut mengakibatkan dua hal. Pertama, terdapat perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja di masing-masing sektor. Kedua, secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusinya dalam pendapatan nasional.

2.1.4 Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja terhadap PDB, Jumlah Industri, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Indeks Globalisasi

Menurut Sumarsono (2003) elastisitas merupakan ukuran derajat kepekaan jumlah permintaan akan sesuatu terhadap perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Dalam ilmu ekonomi elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Besar kecilnya elastisitas permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memungkinkan substitusi tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor produksi lainnya, elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan dan elastisitas persediaan dari faktor produksi pelengkap lainnya. Elastisitas penyerapan tenaga kerja adalah ukuran yang menunjukkan tingkat responsivitas penyerapan tenaga kerja terhadap PDB, jumlah industri, penanaman modal dalam negeri, dan indeks globalisasi. Secara umum, elastisitas dapat dinyatakan sebagai:

$$E\partial = \frac{\partial PTK}{\partial \text{Log}X_1, \text{Log}X_2, \text{Log}X_3, \text{Log}X_4} X \frac{\text{Log}X_1, \text{Log}X_2, \text{Log}X_3, \text{Log}X_4}{PTK}$$

Dimana:

$E\partial$: Nilai Elastisitas

∂PTK : Persentase perubahan penyerapan tenaga kerja (Y)

∂x : Persentase Perubahan Variabel X yaitu PDB, Jumlah Industri, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Indeks Globalisasi

$\text{Log}X_1$: PDB Sektor Industri Manufaktur

$\text{Log}X_2$: Jumlah Industri Manufaktur

$\text{Log}X_3$: Penanaman Modal Dalam Negeri Sektor Industri Manufaktur

$\text{Log}X_4$: Indeks Globalisasi

Adapun kriteria elastisitas yaitu:

- a. $E > 1$: Elastisitas dimana variabel yang diukur sangat responsif terhadap perubahan variabel penyebab
- b. $E = 1$: Uniter Elastisitas: Perubahan pada variabel penyebab menghasilkan perubahan proporsional pada variabel yang diukur
- c. $E < 1$: Inelastis: Variabel yang diukur kurang responsif terhadap perubahan variabel penyebab
- d. $E = 0$: Tidak Elastis (*Perfectly Inelastic*): Tidak ada perubahan pada variabel yang diukur meskipun variabel penyebab berubah

2.1.5 Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Permintaan dalam konteks ekonomi merujuk pada jumlah maksimum barang atau jasa yang diinginkan oleh seorang pembeli untuk dibeli pada setiap tingkat harga yang mungkin selama periode waktu tertentu (Sudarsono, 1990). Dalam konteks tenaga kerja, permintaan tenaga kerja berhubungan dengan jumlah pekerja yang diperlukan oleh suatu perusahaan atau industri. Umumnya, permintaan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat upah dan faktor-faktor lain yang memengaruhi permintaan hasil produksi. Ketika tingkat upah meningkat, keinginan pengusaha untuk memperoleh tenaga kerja cenderung menurun.

Penawaran tenaga kerja mencakup jumlah pekerjaan yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap tingkat upah yang mungkin terjadi dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik sumber daya manusia, pekerja dianggap sebagai individu yang memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan bekerja atau tidak, bahkan hingga menentukan jumlah jam kerja yang diinginkannya. Dasar dari teori ini merujuk pada teori konsumen, di mana setiap individu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dengan mempertimbangkan keterbatasan yang dihadapi.

Jumlah pekerja yang aktif terlibat dalam kegiatan bekerja dipengaruhi oleh permintaan keseluruhan dalam masyarakat. Tingkat penempatan atau tingkat pekerjaan dipengaruhi oleh kekuatan interaksi antara penawaran dan permintaan tersebut. Lebih lanjut, volume penawaran dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah. Jika tingkat upah naik, maka jumlah penawaran tenaga kerja

cenderung meningkat. Sebaliknya, jika tingkat upah meningkat, permintaan tenaga kerja dapat menurun.

2.1.6 Industri Manufaktur

Menurut pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 tahun 2014, industri adalah segala sesuatu yang mengolah bahan mentah dan menggunakan sumber daya industri untuk menghasilkan barang yang bernilai atau keuntungan lebih tinggi, termasuk jasa industri ini adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) industri manufaktur adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan dalam suatu kegiatan industry (Widyaningrum & Bintariningtyas, 2021).

Pengelompokan industri berdasarkan jumlah tenaga kerja dibedakan menjadi empat kriteria, antara lain:

1. Industri besar dengan jumlah pekerja 100 orang atau lebih.
2. Industri sedang/menengah dengan jumlah pekerja 20-99 orang..
3. Industri kecil dengan jumlah pekerja 5-19 orang.
4. Industri mikro atau rumah tangga dengan jumlah pekerja 1-4 orang.

Jenis industri berdasarkan nilai asset netto yang diatur dalam undang undang No.9 Tahun 1998, dimana:

1. Industri besar, usaha yang memiliki asset netto (tanpa gedung dan tanah) sebesar 10 miliar keatas.
2. Industri menengah, usaha yang memiliki asset netto (tanpa gedung dan tanah) antara 200 juta sampai 10 miliar.
3. Industri kecil dan mikro, usaha yang memiliki asset netto (tanpa gedung dan tanah) tidak lebih dari 200 juta.

Teori Kaldor menganggap bahwa sektor industri manufaktur merupakan mesin pertumbuhan bagi sebuah wilayah dalam meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor lain sekaligus meningkatkan PDB (Necmi, 1999). Teori pertumbuhan Kaldor dalam penelitian Dewi (2010), teori ini terdapat tiga aspek industri yang disorot. Pertama, Pertumbuhan GDP memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan. Kedua, produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan itu sendiri. Dalam hal ini sektor industri pengolahan dianggap dapat menghasilkan *increasing return to scale* (skala pengembalian yang meningkat). Skala tersebut dapat tercipta apabila sektor ini melakukan akumulasi modal dan inovasi teknologi. Dalam hal ini *learning by doing* sangat penting untuk mempertahankan kondisi mapan yang bersifat jangka panjang pada sektor tersebut. Ketiga, pertumbuhan sektor non-industri pengolahan memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan sektor non-industri pengolahan yang mengarah pada *diminishing return to scale*. Teori pertumbuhan industri Kaldorian kedua menyebutkan bahwa *increasing return to scale* hanya dapat tercipta dengan adanya akumulasi modal dan

kemajuan teknologi. Faktor investasi menjadi sorotan tersendiri dalam pengembangan teori, dikarenakan investasi mampu memberikan *manufacturing insentive* yang dapat mempercepat pertumbuhan sektor. Dibutuhkan tingkat investasi yang tinggi untuk dapat memperbaharui mekanisasi teknik dari produksi.

2.1.7 PDB Sektor Industri Manufaktur

PDB adalah peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ini diukur melalui perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Menurut Mankiw (2014), PDB yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. Dalam konteks pengangguran, teori Keynesian menunjukkan bahwa PDB yang positif cenderung mengurangi pengangguran. Ketika perekonomian tumbuh, perusahaan akan meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan yang meningkat, yang pada gilirannya membutuhkan lebih banyak tenaga kerja.

Perekonomian suatu negara sering kali diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB), yang mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode tertentu. pertumbuhan PDB tidak selalu merata di seluruh sektor ekonomi. Beberapa sektor dapat mengalami pertumbuhan yang jauh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya, yang berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam penciptaan lapangan kerja. Misalnya, sektor industri mungkin tumbuh lebih cepat daripada sektor pertanian, yang dapat menyebabkan pengangguran struktural jika pekerja tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk beralih ke sektor yang lebih berkembang (Todaro & Smith, 2011).

2.1.8 Jumlah Industri Sektor Manufaktur

Jumlah industri adalah banyaknya unit usaha yang berada di suatu daerah yang melaksanakan kegiatan produksi atau kegiatan usaha untuk menghasilkan suatu output yang berupa barang dan jasa. Terjadinya pertumbuhan unit usaha industri di daerah dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dalam ilmu ekonomi, perusahaan dibedakan antara pengertian perusahaan dan unit usaha. Unit usaha adalah jenis usaha, tempat memproduksi atau membuat barang dan bertanggung jawab terhadap hasilnya disebut juga pabrik. Sedangkan perusahaan lebih menitikberatkan pada semua pengelolaan usaha, termasuk keuangan, produksi dan pemasaran. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), unit usaha adalah unit yang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan dan mempunyai kewenangan yang ditunjukkan berdasarkan kebenaran lokasi bangunan fisik dan wilayah operasinya. Secara umum pertumbuhan unit usaha suatu sektor dalam hal ini industri kecil menengah dan besar pada suatu daerah akan menambah jumlah lapangan pekerjaan. Menurut Azis Prabowo (dalam Nurafuah, 2015) jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap permintaan tenaga kerja, artinya jika unit usaha suatu industri ditambah maka permintaan tenaga kerja juga bertambah. Semakin banyak jumlah perusahaan atau unit usaha yang berdiri maka akan semakin banyak untuk terjadi penambahan tenaga kerja (Azis Prabowo, 1997 dalam Nurafuah, 2015).

2.1.9 Penanaman Modal Dalam Negeri Sektor Industri Manufaktur

Investasi atau penanaman modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal diberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing dan modal asing. Pengertian-pengertian ini terdapat pada Bab 1 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pengaturan tentang kegiatan penanaman modal di Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang kegiatan penanaman modal asing memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno, 2000) Adanya kegiatan ini akan mendorong terciptanya barang modal baru Penanaman Modal. Dalam Pasal 3 ayat (I) huruf a, disebutkan bahwa kegiatan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum. Sementara itu yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum di Indonesia. Konsistensi peraturan ditunjukkan dengan adanya peraturan yang tidak saling bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, dan dapat dijadikan pedoman untuk suatu jangka waktu yang cukup.

2.1.10 Indeks Globalisasi

Globalisasi sendiri merupakan sebuah proses meningkatnya keterhubungan dalam lingkup internasional, yang tercermin dalam kemudahan perdagangan antar negara, mobilitas tenaga kerja, dan adanya pasar bebas yang mengakibatkan berkurangnya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Sebagai konsep yang memiliki makna yang luas, Looney & Frederiksen, (2004) menjelaskan dalam penelitian mereka bahwa globalisasi memiliki definisi yang bervariasi bagi setiap individu, dan dampaknya juga akan beragam berdasarkan perspektif individu masing-masing. Dari segi teori dan hasil penelitian empiris, globalisasi ekonomi telah terbukti mendorong PDB suatu negara (Ezcurra & Rodriguez-Pose, 2013), karena membuka akses negara tersebut ke pasar dunia, yang selanjutnya memudahkan perdagangan internasional dan mendorong investasi asing masuk ke dalam negeri tersebut (Stiglitz, 2017).

Pada zaman sekarang perdagangan bebas dan aliran informasi, barang dan jasa antar negara di dunia terus meningkat, yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada perekonomian suatu negara. Globalisasi akan membawa

perubahan yang cepat. Beberapa elemen yang berkontribusi pada fenomena ini meliputi revolusi digital, liberalisasi perdagangan, keseragaman produk dan layanan di seluruh dunia, serta ekspor yang fokus pada pertumbuhan. Sebagai akibat dari globalisasi, perdagangan internasional akan mengalami peningkatan; namun, fenomena ini sering kali berdampak besar pada ekonomi nasional masing-masing negara. Saat ini, *KOF Globalization Index* muncul sebagai salah satu indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur tingkat globalisasi suatu negara. Ini didefinisikan oleh *Swiss Economic Institute* sebagai sebuah indeks yang mengevaluasi semua aspek ekonomi, sosial, dan politik globalisasi suatu negara. Salah satu aspek paling signifikan dari globalisasi yang dimulai pada tahun 1970 adalah globalisasi ekonomi, sosial, dan politik. Masing-masing merangkum masalah penting yang berbeda, yang menggambarkan tingkat intervensi global terhadap aspek ekonomi, sosial, dan politik suatu negara (Gygli et al., 2019)

Indeks globalisasi disusun dari 23 variabel ekonomi, sosial, dan politik. Indeks globalisasi KOF ini memiliki skala 1 hingga 100, dimana semakin tinggi skalanya menunjukkan tingkat globalisasi yang semakin tinggi pula. Indeks globalisasi tersebut masing-masing memiliki bobot 36 persen untuk globalisasi ekonomi, 38 persen untuk indeks globalisasi sosial, dan 26 persen untuk indeks globalisasi politik, yang mana bobot dari ketiga sub-indeks tersebut dipergunakan untuk menghitung globalisasi secara keseluruhan.

Menurut Halg (2020), penghitungan indeks ini dimulai dengan pengumpulan data oleh para peneliti dari berbagai sumber, termasuk data perdagangan, investasi, dan migrasi. Data yang diperoleh kemudian diolah menjadi

angka-angka yang dapat dengan mudah dibandingkan. Semua data yang dikumpulkan disesuaikan skalanya agar dapat dibandingkan secara langsung; misalnya, skala data perdagangan antara negara A dan negara B akan disamakan. Setiap faktor yang digunakan dalam perhitungan indeks diberikan bobot atau nilai penting yang berbeda-beda, dan bobot ini dapat berubah seiring waktu berdasarkan relevansi faktor tersebut dalam mengukur globalisasi pada tahun tertentu. Faktor-faktor yang serupa dikelompokkan ke dalam sub-indeks, seperti sub-indeks perdagangan atau investasi, yang kemudian digabungkan menjadi satu indeks keseluruhan.

Keunggulan dari indeks ini terletak pada kemampuannya untuk mempertimbangkan berbagai faktor, sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang tingkat globalisasi suatu negara. Bobot setiap faktor dapat berubah dari waktu ke waktu, memungkinkan indeks ini untuk mencerminkan perubahan pola globalisasi. Metode perhitungan indeks ini cukup transparan dan jelas, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya.

Tabel 2. 1 Indeks KOF Globalisasi menurut ETH Zurich

Indikator	Kontribusi (%)	Sub-Indikator	Kontribusi (%)	Variabel	Bobot
Globalisasi Ekonomi	36	Aliran Aktual	50	Rata-rata Perdagangan	22
				Investasi Langsung Asing	27
				Investasi Portofolio	24
				Pendapatan Pembayaran kepada Warga Negara Asing	27
				Kendala Impor yang	24
		Hambatan	50		

				Belum Ditemukan	
				Tingkat Varians Tarif	28
				Pajak Perdagangan Internasional	26
				Kendala Akun Modal	23
Globalisasi Sosial	38	Kontak Pribadi	33	Tarif Telepon	25
				Transfer (% dari PDB)	3
				Pariwisata Internasional	26
				Populasi Warga Negara Asing	21
				Surat Internasional Per kapita	25
		Informasi Arus	35	Penggunaan Internet (per 1000 orang)	36
				Televisi (per 1000 orang)	38
				Perdagangan Surat Kabar (% dari PDB)	26
		Ukuran Kedekatan Budaya	32	Jumlah Restoran Outlet Mcdonald's (Per Kapita)	44
				Jumlah Outlet Ikea (Per Kapita)	44
				Perdagangan Buku (% dari PDB)	11
Globalisasi Politik	26	Jumlah <i>Ambassador</i>	25		
		Anggota Organisasi Internasional	27		
		Partisipasi Angkatan Dewan	22		
		Perjanjian PBB Internasional	26		

Sumber: Halg (2020)

Indeks Globalisasi yang dikembangkan oleh ETH Zurich membagi globalisasi menjadi tiga dimensi utama: ekonomi, politik, dan sosial. Pembagian ini memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai tingkat keterhubungan dan ketergantungan antar negara. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang ketiga dimensi tersebut:

1. Globalisasi Ekonomi

Martin Wolf mengartikan globalisasi sebagai tahapan pembangunan ekonomi yang sudah final dan semua negara merupakan pemeran utama yang berkompetensi dalam arena tersebut (Jati, 2013). Globalisasi ekonomi merupakan pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam sistem ekonomi global. Globalisasi ekonomi menghendaki persaingan bebas melalui mekanisme pasar sehingga mekanisme pasar itulah yang menentukan produk dari sebuah negara dapat bersaing atau tidak. tingkat keterbukaan terhadap investasi asing dan integrasi dalam rantai pasok.

2. Globalisasi Sosial

Dimensi ini mengukur tingkat interaksi dan keterhubungan antara masyarakat di berbagai negara. Komponen pentingnya mencakup interaksi antar individu, seperti jumlah wisatawan dan migran, serta aliran informasi melalui teknologi komunikasi, termasuk internet dan media sosial. Pertukaran budaya, seperti penyebaran musik, film, dan gaya hidup juga merupakan bagian dari dimensi ini. Tingkat globalisasi sosial yang tinggi dapat memperkaya budaya, meningkatkan toleransi, dan mempercepat penyebaran ide-ide baru;

namun, hal ini juga dapat menyebabkan homogenisasi budaya dan hilangnya identitas lokal.

3. Globalisasi Politik

Globalisasi politik adalah pergulatan global dalam mewujudkan kepentingan para aktor politik yang menjalankannya. Wujud nyata globalisasi politik hingga saat ini adalah terbentuknya berbagai organisasi dalam lingkup regional ataupun internasional dan kerja sama, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, serta munculnya isu global yang menjadi masalah seluruh negara di dunia.

2.1.11 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat asas hasil analisis yang dilakukan. Ringkasan penelitian terdahulu terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	(Irawati & Prasetyanto, 2022) Analisis Variabel Makroekonomi Dalam Mempengaruhi	Variabel Dependen: penyerapan tenaga kerja Independen: penanaman	Variabel PDB, jumlah industry dan indeks globalisasi	Penanaman modal dalam negeri memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap	<i>Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam</i> , 5(02), 40–47. https://doi.org/1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyerapan tenaga kerja				
2.	(Binti, 2016) Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan Di Provinsi Kalimantan Tengah.	Variabel Dependen: Penyerapan Tenaga Kerja Independen: PDB, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Jumlah Industri	Variabel Indeks Globalisasi Objek Penelitian: Sektor Industri Pengolahan Di Provinsi Kalimantan Tengah	PDB, UMR, PMDN dan Jumlah Industri secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Tengah	<i>JEPP : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata</i> , 2(2), 83–98. https://doi.org/10.52300/jepp.v2i2.5647
3.	(Klarisa & Prasetyanto, n.d.) Analisis variabel makroekonomi dalam mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di pulau jawa.	Variabel Dependen: penyerapan tenaga kerja Independen: penanaman modal dalam negeri	Variabel PDB, Indeks Globalisasi dan Jumlah Industri Objek Penelitian: tenaga kerja di pulau jawa.	Penanaman modal dalam negeri memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di pulau jawa	<i>Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam</i> , 5(02), 40–47. https://doi.org/10.56998/jr.v5i02.51
4.	(Prasetya, 2021) Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, PDB Dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia.	Variabel Dependen: penyerapan tenaga kerja Independen: PDB	Variabel jumlah industry, PMDN dan Indeks Globalisasi Objek Penelitian Indonesia	PDB secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia	<i>Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi</i> , 1–22.
5.	(Fadillah & Priana, 2020) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	Variabel Dependen: penyerapan tenaga kerja Independen: PDB	Variabel jumlah industry, PMDN dan Indeks Globalisasi Objek	Jumlah industri kecil berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan variabel	<i>Jurnal Ilmiah Multidisiplin</i> , 1(9), 3010–3019.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Barat		Penelitian Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jawa Barat.	PDB juga tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja	
6.	(Rakhmawati & Boedirochminarni, 2018) Pengaruh Upah Minimum, Pendidikan, dan Jumlah Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Gresik Tahun 2015 - 2019.	Variabel Dependen: penyerapan tenaga kerja Independen: jumlah industry	Variabel PDB, PMDN dan Indeks Globalisasi Objek Penelitian Tenaga Kerja di Kabupaten Gresik Tahun 2015 - 2019	Jumlah industri tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.	<i>Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya</i> , 10(1), 1–10. <i>Retrieved from</i> https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/8143
7.	(Amanda, 2016) Pengaruh PDB Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Sulawesi.	Variabel Dependen: penyerapan tenaga kerja Independen: PDB	Variabel jumlah industry, PMDN dan Indeks Globalisasi Objek Penelitian Tenaga Kerja Di Sulawesi	PDB memiliki pengaruh negative terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Se Sulawesi	<i>POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen</i> , 4(2), 101–111. https://doi.org/10.46918/point.v4i2.1635
8.	(Doni, 2023) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sumatera Barat.	Variabel Dependen: penyerapan tenaga kerja Independen: PDB	Variabel jumlah industry, PMDN dan Indeks Globalisasi Objek Penelitian Tenaga Kerja Di Provinsi Sumatera Barat	Variabel PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat	<i>Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan</i> , 3(2), 145–158. https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i2.466

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	(Yacob et al., 2015) Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Dan PMA Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral Di Provinsi Sulawesi Tenggara.	Variabel Dependen: penyerapan tenaga kerja Independen: Penanaman Modal Dalam Negeri	Variabel PDB, jumlah industry dan Indeks Globalisasi Objek Penelitian Tenaga Kerja Sektoral Di Provinsi Sulawesi Tenggara	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral di Provinsi Sulawesi Tenggara.	<i>Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)</i> , 7(2), 156. https://doi.org/10.33772/jpep.v7i2.22541
10.	(Anjani & Fitryani, 2022) Pengaruh jumlah industri terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten sumbawa.	Variabel Dependen: penyerapan tenaga kerja Independen: jumlah industry	Variabel PDB, PMDN dan Indeks Globalisasi Objek Penelitian tenaga kerja di kabupaten sumbawa	Jumlah industri (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y).	<i>Jurnal Ekonomi & Bisnis</i> , 10(1), 93–100. https://doi.org/10.58406/jeb.v10i1.734
11.	(Habibi & Marta, 2023) Pengaruh Jumlah Industri, Jumlah Penduduk dan Output Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Kecil di Indonesia.	Variabel Dependen: penyerapan tenaga kerja Independen: jumlah industry	Variabel PDB, PMDN dan Indeks Globalisasi Objek Penelitian Tenaga Kerja Sektor Industri Kecil di Indonesia	Jumlah industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil di Indonesia.	<i>Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan</i> , 5(2), 41. https://doi.org/10.24036/jkep.v5i2.14856

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	(Chomariah & Sri, 2023) Analisis Faktor-Faktor Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Besar dan Sedang Di Kabupaten Gresik.	Variabel Dependen: penyerapan tenaga kerja Independen: jumlah industri dan PDB	Variabel PMDN dan Indeks Globalisasi Objek Penelitian tenaga kerja di kabupaten sumbawa	PDRB, jumlah industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Gresik..	<i>JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)</i> , 9(4), 1170–1181. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1264
13.	(Druhova, 2023) <i>Globalization of the labor market: dynamics of migration flows in the context of international agreements.</i>	Variabel Dependen: penyerapan tenaga kerja Independen: Globalisasi	Variabel PDB, PMDN dan Jumlah industri	Globalisasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.	<i>Modern Scientific Journal</i> , 2(2), 109–114. https://doi.org/10.36994/2786-9008-2023-2-15
14.	(Purba et al., 2023) Dampak Globalisasi Dalam Mempengaruhi Ekonomi Nasional Melalui Pandangan Ekonomi Politik	Variabel Dependen: penyerapan tenaga kerja Independen: Globalisasi	Variabel PDB, PMDN dan Jumlah industri	Globalisasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja	<i>EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan</i> , 10(2), 402–414. https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v10i2.1925

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	(Lini & Sasana, 2019)Pengaruh tingkat globalisasi terhadap pengangguran di asean.	Variabel Dependen: penyerapan tenaga kerja Independen: Globalisasi	Variabel PDB, PMDN dan Jumlah industri. Objek Penelitian tenaga kerja di ASEAN.	Tingkat globalisasi sosial dan politik berpengaruh pada pengurangan pengangguran,	<i>Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)</i> , 4(1), 13–26. https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1338

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan PDB dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Pada umumnya, PDB yang positif dan berkelanjutan akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, yang selanjutnya akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja. Ketika perekonomian sedang berkembang, perusahaan-perusahaan akan cenderung melakukan ekspansi, investasi, dan penambahan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan produksi dan pelayanan. Sebaliknya, penyerapan tenaga kerja yang baik juga akan berkontribusi terhadap PDB, karena semakin banyak orang yang bekerja akan meningkatkan pendapatan, daya beli masyarakat, dan produktivitas nasional. Namun, hubungan ini tidak selalu linier dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti struktur ekonomi, kebijakan pemerintah, tingkat pendidikan, dan kondisi pasar tenaga kerja.

Selain itu elastisitas PDB juga merupakan faktor penting karena elastisitas yang mengukur sejauh mana perubahan tingkat PDB mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Hubungan antara elastisitas PDB dan penyerapan tenaga kerja sangat penting untuk melihat bagaimana sistem penyerapan tenaga kerja beradaptasi

dengan PDB yang berubah-ubah, terutama terkait dengan tingkat pendapatan suatu negara dalam prospek penyerapan tenaga kerja.

Todaro (1995) mengemukakan bahwa PDB berkelanjutan menjadi prasyarat utama penciptaan lapangan kerja, sedangkan (Mankiw., 2006) menekankan adanya *multiplier effect* yang mendorong peningkatan kesempatan kerja melalui investasi dan ekspansi sektor produktif. (Sukirno, 2011) lebih lanjut menegaskan bahwa dinamika hubungan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor kompleks seperti struktur ekonomi, kebijakan pemerintah, kualitas sumber daya manusia, dan tingkat investasi, sehingga tidak dapat dipandang secara sederhana linear.

Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Pamungkas (2022), Widyapangesti & Soelistyo (2022) dan Nurkhasanah dkk (2023) menyebutkan PDB mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur. Noviatamara dkk (2019) mengungkapkan bukti empiris bahwa setiap kenaikan 1% PDB berpotensi meningkatkan kesempatan kerja hingga 0,7%, yang menunjukkan korelasi positif yang signifikan. Diperkuat dengan Studi Ekawati (2019) dan bahkan membuktikan adanya hubungan kausalitas dua arah, yang berarti PDB dan penyerapan tenaga kerja secara simultan saling memengaruhi dan membentuk siklus pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2.2.2 Hubungan Jumlah Industri dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Hubungan antara jumlah industri dan penyerapan tenaga kerja memiliki korelasi yang signifikan dalam dinamika ekonomi suatu wilayah atau negara. Semakin banyak industri yang berkembang, secara umum akan meningkatkan

kesempatan kerja dan memperluas penyerapan tenaga kerja. Ketika suatu daerah memiliki jumlah industri yang semakin bertambah, hal ini berarti akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan di berbagai sektor, mulai dari industri manufaktur, industri pengolahan, hingga industri jasa pendukung. Pertambahan jumlah industri tidak hanya berdampak pada penyediaan lapangan kerja langsung di dalam industri tersebut, tetapi juga menciptakan *multiplier effect* yang dapat mendorong terbukanya peluang kerja di sektor-sektor terkait, seperti transportasi, perdagangan, dan layanan pendukung lainnya. Namun, perlu diperhatikan bahwa kualitas dan jenis industri juga turut menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja, bukan semata-mata dari kuantitas jumlah industri yang ada.

Untuk melihat kepekaan penyerapan tenaga kerja terhadap jumlah industri terlihat dari elastisitas. Jumlah industri memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian negara, dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah industri semakin merata pula dalam penyerapan tenaga kerja yang dihasilkan dalam suatu negara. Oleh karena itu, elastisitas jumlah industri terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi faktor kunci dalam menentukan seberapa besar pengaruh jumlah industri terhadap penyerapan tenaga kerja.

Penelitian (Suatan et al., 2023), Pamungkas (2022) juga menegaskan bahwa pengembangan industri merupakan salah satu strategi fundamental dalam menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas ekonomi suatu wilayah. Hal ini diperkuat oleh studi Tambunan (2020) yang menyatakan bahwa sektor industri manufaktur memiliki peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja, terutama pada industri padat karya. Hal ini didukung penelitian Suseno (2022),

peningkatan jumlah industri secara positif mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, di mana setiap penambahan unit industri berpotensi menciptakan kesempatan kerja baru. Lebih lanjut, penelitian Rizki dkk (2019), menunjukkan bahwa terdapat korelasi signifikan antara pertumbuhan industri dan kapasitas penyerapan tenaga kerja, dengan catatan bahwa kualitas industri, tingkat teknologi, dan skala usaha turut menentukan besaran penyerapan tenaga kerja.

2.2.3 Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan Penyerapan

Tenaga Kerja

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki hubungan langsung dengan penyerapan tenaga kerja. Semakin besar investasi yang dilakukan, semakin besar pula potensi penciptaan lapangan kerja. PMDN mendorong pertumbuhan sektor riil, membuka peluang kerja, dan menciptakan efek berantai pada sektor terkait, sehingga berkontribusi signifikan dalam menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Elastisitas penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap penyerapan tenaga kerja menggambarkan sejauh mana perubahan dalam arus investasi dalam negeri mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja, hubungan antara elastisitas penanaman modal dalam negeri dan penyerapan tenaga kerja menjadi kunci dalam memahami bagaimana arus penanaman modal dalam negeri ini dapat memperkuat dalam pemerataan penyerapan tenaga kerja.

Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan penyerapan tenaga kerja memiliki signifikansi yang mendalam dalam perspektif ekonomi

pembangunan. Todaro (2016) juga menegaskan bahwa penanaman modal merupakan instrumen kunci dalam transformasi struktural ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, terutama pada sektor-sektor produktif yang padat karya. Menurut penelitian Wahyudi (2019), Dewi & Gunawan (2018), dan Widyapangesti & Soelistyo (2022) terdapat korelasi positif antara investasi domestik dan penyerapan tenaga kerja, di mana setiap peningkatan investasi 1% berpotensi menciptakan kesempatan kerja baru. Hal ini diperkuat oleh studi Kuncoro (2019) yang menyatakan bahwa PMDN berperan strategis dalam mendorong PDB dan perluasan lapangan kerja.

2.2.4 Hubungan Indeks Globalisasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja

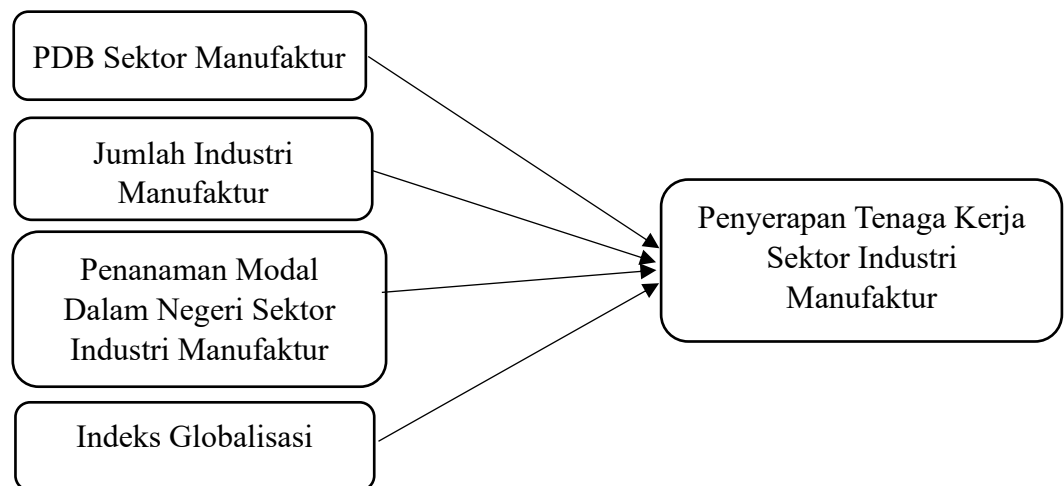
Hubungan indeks globalisasi dengan penyerapan tenaga kerja merupakan fenomena kompleks yang mencerminkan saling ketergantungan ekonomi global. Semakin tinggi tingkat globalisasi, semakin terbuka peluang pertukaran sumber daya manusia, modal, dan teknologi antar negara. Globalisasi mendorong terjadinya perpindahan investasi, pembukaan pasar internasional, dan pertukaran tenaga kerja lintas negara, yang pada gilirannya mempengaruhi struktur ketenagakerjaan. Perusahaan multinasional, perdagangan bebas, dan integrasi ekonomi global membuka kesempatan baru bagi tenaga kerja untuk mengakses pasar kerja yang lebih luas, namun di sisi lain juga menciptakan persaingan yang semakin ketat. Dampak globalisasi terhadap penyerapan tenaga kerja tidak hanya bersifat kuantitatif dalam hal jumlah lapangan kerja, tetapi juga kualitatif dalam hal peningkatan keterampilan, adaptabilitas, dan daya saing tenaga kerja di kancah internasional.

Selain itu, elastisitas indeks globalisasi juga merupakan faktor penting karena elastisitas yang mengukur sejauh mana perubahan tingkat indeks globalisasi mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dalam suatu negara. Hubungan antara elastisitas indeks globalisasi dan penyerapan tenaga kerja sangat penting untuk melihat bagaimana sistem penyerapan tenaga kerja beradaptasi dengan indeks globalisasi terutama dalam pengaruh suatu negara dalam akses global.

Hubungan indeks globalisasi dengan penyerapan tenaga kerja memiliki kompleksitas yang signifikan dalam dinamika ekonomi global. Menurut penelitian Stiglitz (2022) dan Halg (2020), globalisasi secara fundamental mempengaruhi struktur ketenagakerjaan melalui mekanisme perpindahan modal, teknologi, dan sumber daya manusia antarwilayah. Diperkuat pendapat dari Keohane (2020) globalisasi tidak sekadar mempengaruhi kuantitas lapangan kerja, melainkan juga kualitas dan kompleksitas hubungan ketenagakerjaan dalam konteks ekonomi transnasional, yang mensyaratkan adaptabilitas dan fleksibilitas tenaga kerja dalam menghadapi perubahan global.

Hal ini sejalan dengan studi empiris dari jurnal ekonomi internasional oleh Rodrik (2018) menunjukkan bahwa peningkatan indeks globalisasi berkorelasi positif dengan perluasan kesempatan kerja negara maju namun peningkatan indeks globalisasi berkorelasi negatif dengan perluasan kesempatan kerja dengan negara berkembang, terutama pada sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif. Diperkuat penelitian Bhagwati (2024) menegaskan bahwa globalisasi menciptakan transformasi struktural pasar tenaga kerja, di mana mobilitas dan keterampilan menjadi faktor kunci daya saing.

Berdasarkan penjelasan di atas, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial PDB sektor industri manufaktur, jumlah industri manufaktur, penanaman modal dalam negeri sektor industri manufaktur berpengaruh positif, sedangkan indeks globalisasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia 1994-2023.
2. Diduga secara bersama-sama PDB sektor industri manufaktur, jumlah industri manufaktur, penanaman modal dalam negeri sektor industri manufaktur, dan indeks globalisasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia 1994-2023.